
STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN DI DESA BANYUBIRU

Harry Setyawan¹

Retno Febriyastuti Widyawati²

(Pemerintah Desa Banyubiru Kabupaten Semarang¹, Indonesia, Universitas Negeri Semarang, Indonesia²)

Email: harryrunita@students.unnes.ac.id¹; retnofw@mail.unnes.ac.id²

Article Info

Article history:

Received: Okt 25, 2025

Accepted: Des 10, 2025

Published: Des 25, 2025

Page: 1 – 16

Keyword:

Village Fund, Effectiveness,
Village Development, Budget
Management, Community
Empowerment

Corresponding Author:

Name: Harry Setyawan

E-mail:

harryrunita@students.unnes.ac.id

Abstract

Sustainable infrastructure development in the village requires active participation of the community so that the results of development not only have a short-term impact, but also can be maintained and utilized in the long run. Community involvement in infrastructure development in Banyubiru Village still faces various challenges, both from the social, economic, and institutional side. This study aims to identify obstacles and formulate effective community empowerment strategies in the development of sustainable infrastructure in Banyubiru Village, Semarang Regency. Research uses a qualitative approach with descriptive methods, and data is collected through in-depth interviews and field observations. The results showed that the main obstacles in community empowerment include overlapping development priority scale, inequality of involvement between regions, low participation due to economic pressure, lack of the role of the younger generation, and lack of social inclusiveness. The strategies implemented by the village government include formal institutional involving, capacity strengthening through training, socio-cultural approaches, utilization of mutual cooperation, and the application of sustainability principles. The conclusion of this study emphasizes the importance of building an inclusive and sustainable structure of participation, as well as the need for integration between technical and socio-cultural aspects in the process of empowering village communities.

Pendahuluan

Desa Banyubiru merupakan salah satu dari 10 Desa yang berada di wilayah Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Desa Banyubiru terdiri dari 9 Dusun yaitu, Krajan, Kampung Rapet, Randusari, Tegalwuni, Cerbonan, Demakan, Pancuran, Dangkel, dan Tawang Rejo. Dengan jumlah penduduk 8.746 jiwa dan luas wilayah Desa : 677.087 Ha, di mana 192.087 Ha dari luas wilayah tersebut adalah tanah persawahan atau lahan pertanian menjadikan Desa Banyubiru sebagai salah satu wilayah dengan luasan dan jumlah penduduk yang padat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 78 tentang Desa menetapkan bahwa tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup, dan mengurangi kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan infrastruktur, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Namun, realitas yang ada sering kali tidak sesuai dengan tujuan tersebut, di mana kualitas pembangunan infrastruktur belum dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat.

Undang-Undang ini, beserta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang mengatur pelaksanaannya, menegaskan bahwa pembangunan desa harus dilandasi prinsip kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong. Perencanaan pembangunan desa harus melibatkan masyarakat desa secara partisipatif, termasuk dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa), yang diorganisir melalui musyawarah desa dengan keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat lainnya. Sejauh ini partisipasi masyarakat umumnya masih terbatas pada keterlibatan dalam pelaksanaan program-program atau kegiatan pemerintah. Padahal, partisipasi yang ideal seharusnya mencakup semua tahap, mulai dari perencanaan hingga pengambilan keputusan, bukan hanya pada tahap pelaksanaan (Rorong et al., 2020).

Desa Banyubiru merupakan salah satu desa yang memiliki potensi besar dalam pengembangan infrastruktur berkelanjutan. Dengan luas wilayah yang cukup besar dan populasi yang terlibat dalam berbagai sektor ekonomi. Desa Banyubiru memiliki sumber daya yang cukup untuk mendukung pembangunan. Namun, tanpa keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan, potensi tersebut mungkin tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya penting untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan, tetapi juga untuk memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun dapat dikelola dan dipelihara dengan baik dalam jangka panjang. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa sangat penting karena mereka lebih memahami berbagai masalah yang ada, seperti infrastruktur desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan. Pengetahuan ini membantu mempermudah proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan (Tumbel, 2014).

Pelaksanaan pembangunan desa wajib melibatkan seluruh masyarakat desa melalui semangat gotong royong, memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam yang ada di desa tersebut. Selain itu, masyarakat desa berhak mendapatkan informasi terkait rencana dan pelaksanaan pembangunan desa, serta memiliki hak untuk melakukan pemantauan terhadap proses pelaksanaan pembangunan tersebut. Pembangunan seharusnya dilakukan dari, oleh, dan untuk rakyat. Pandangan ini menekankan pentingnya prinsip demokrasi dalam pembangunan

nasional, di mana masyarakat perlu terlibat secara langsung bukan karena paksaan atau mobilisasi, melainkan sebagai bentuk partisipasi yang didorong oleh kesadaran penuh (Kartasasmitra, 1996).

Pemberdayaan masyarakat dalam konteks pengembangan infrastruktur berkelanjutan berarti memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pemeliharaan. Hal ini mencakup pelatihan, peningkatan kapasitas, dan pengembangan kesadaran masyarakat akan pentingnya infrastruktur yang berkelanjutan. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat dari pembangunan tetapi juga menjadi aktor utama yang turut menentukan arah dan keberlanjutan pembangunan tersebut. Sebagaimana dinyatakan oleh Susilo (2015), partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa adalah salah satu pilar utama keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan di daerah pedesaan. Dwiningrum (2011) partisipasi merupakan keikutsertaan individu atau kelompok dalam suatu kegiatan. Partisipasi ini melibatkan keterlibatan mental, emosional, dan fisik, di mana setiap orang menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan serta mendukung pencapaian tujuan. Selain itu, partisipasi juga mencakup tanggung jawab atas peran yang dimainkan selama keterlibatan tersebut.

Berbagai penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan infrastruktur dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan proyek-proyek pembangunan. Di sisi lain, pengembangan infrastruktur yang tidak melibatkan masyarakat sering kali mengalami berbagai masalah, seperti keterlambatan, biaya yang membengkak, dan rendahnya tingkat pemeliharaan setelah proyek selesai. Penelitian Hardianti et al., (2017) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa masih rendah dengan alasan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi mereka dalam program pembangunan tersebut dan salah satunya disebabkan rendahnya tingkat pendidikan. Oleh karena itu, strategi pemberdayaan masyarakat menjadi penting untuk diidentifikasi dan diterapkan dalam konteks pembangunan desa, khususnya di Desa Banyubiru. Penelitian Wardhani, (2016) menegaskan bahwa keberhasilan program-program pembangunan di desa sangat bergantung pada seberapa besar masyarakat dilibatkan dalam setiap tahapannya, mulai dari perencanaan hingga implementasi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan infrastruktur berkelanjutan di Desa Banyubiru. Tanpa keterlibatan aktif masyarakat, potensi besar yang dimiliki desa ini, baik dari segi sumber daya alam maupun manusia, tidak akan dapat dimanfaatkan secara optimal. Keterlibatan masyarakat tidak hanya memastikan keberlanjutan infrastruktur yang dibangun, tetapi juga memberikan mereka rasa memiliki dan tanggung jawab dalam pemeliharaan infrastruktur tersebut. Selain itu, dengan adanya partisipasi yang lebih aktif, pembangunan desa tidak akan terjebak pada infrastruktur yang hanya bersifat fisik, tetapi juga dapat mengintegrasikan aspek sosial dan ekonomi untuk kesejahteraan jangka panjang. Dengan kondisi wilayah, karakteristik sosial, dan budaya yang unik tentu menjadi tantangan dan hambatan tersendiri bagi masyarakat Desa Banyubiru dalam melakukan pembangunan partisipatif secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini menarik dilakukan untuk menemukan strategi efektif yang dapat meningkatkan keterlibatan dan pemberdayaan

masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Banyubiru, sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, serta melihat tantangan dan hambatan yang dihadapi.

Tinjauan Literatur

Strategi pemberdayaan masyarakat adalah cara untuk mengerahkan tenaga, dana, daya, dan peralatan yang dimiliki guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Arti pemberdayaan masyarakat itu sendiri adalah suatu proses yang mengembangkan dan memperkuat kemampuan masyarakat untuk terus terlibat dalam proses pembangunan yang berlangsung secara dinamis sehingga masyarakat dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi serta dapat mengambil keputusan secara bebas (*independent*) dan mandiri (Sumaryo, 2006).

Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga memiliki definisi upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah memampukan dan mendirikan masyarakat (Mardikanto & Soebiato, 2013).

Sumaryo (2006) strategi dalam pemberdayaan masyarakat mempunyai beberapa tahapan sehingga kegiatan tersebut dapat terealisasi dengan baik, diantaranya:

a. Seleksi wilayah sasaran program

Seleksi wilayah dilakukan sesuai dengan kriteria yang disepati oleh lembaga, pihak-pihak terkait, dan masyarakat. Penetapan kriteria ini penting agar tujuan lembaga dalam pemberdayaan masyarakat akan tercapai serta pemilihan lokasi dilakukan sebaik mungkin. Dalam melakukan seleksi wilayah sasaran program, penyelenggara melakukan identifikasi wilayah sasaran program.

b. Sosialisasi pemberdayaan masyarakat

Sosialisasi program pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang sangat penting untuk menciptakan komunikasi serta dialog dengan masyarakat. Sosialisasi program pemberdayaan pada masyarakat membantu untuk meningkatkan pengertian pada masyarakat dan pihak terkait tentang program. Proses sosialisasi sangat menentukan ketertarikan masyarakat untuk berperan dan terlibat di dalam program-program pemberdayaan masyarakat.

c. Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat

Implementasi program dimulai dengan pembentukan kelompok kerja dan penguatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan. Kegiatan dapat berupa pengembangan usaha ekonomi produktif, pembangunan infrastruktur, atau peningkatan layanan sosial. Pendampingan intensif dilakukan untuk memastikan masyarakat dapat mengelola program secara mandiri. Proses ini menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan.

d. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program pemberdayaan masyarakat

Indikator keberhasilan suatu program pemberdayaan adalah meningkatnya kualitas hidup dari peserta program pemberdayaan. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu program pemberdayaan maka perlu adanya evaluasi yang dilakukan oleh penyelenggara program pemberdayaan. Kegiatan evaluasi adalah kegiatan yang sangat penting dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya evaluasi maka akan

diketahui sejauhmana efektivitas dan efisiensi program pemberdayaan masyarakat dilakukan. Secara umum dikenal dua tipe evaluasi, yaitu *on going evaluation* atau evaluasi terus menerus dan *ex post evaluation* atau evaluasi akhir. Evaluasi berusaha mengidentifikasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada pelaksanaan atau penerapan program.

Pengembangan Infrastruktur Berkelanjutan

Pengembangan infrastruktur berkelanjutan merupakan konsep yang memperhatikan keseimbangan pemenuhan kebutuhan infrastruktur untuk masa sekarang dan untuk masa yang akan datang. Dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan terdapat tiga aspek yang perlu diperhatikan dan diintegrasikan yang meliputi keberlanjutan ekonomi, lingkungan, dan sumber daya (Putri, 2024). Dalam konteks lingkungan, infrastruktur berkelanjutan mengambil peran penting dalam melindungi biodiversitas, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem alam. Penggunaan sumber daya alam yang bijaksana dan implementasi teknologi ramah lingkungan adalah langkah-langkah kunci dalam membangun infrastruktur yang tidak merusak lingkungan (Al-Manshoori & Weber, 2022).

Terdapat 3 aspek dalam pengembangan infrastruktur berkelanjutan yaitu ekonomi, lingkungan dan sumber daya (Hendrawan, 2020).

1) Ekonomi

Pentingnya memberikan akses yang merata terhadap infrastruktur kepada semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil atau ekonomi lemah. Keterlibatan komunitas lokal dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan adalah landasan penting untuk menciptakan infrastruktur yang responsif terhadap kebutuhan mereka (Singh & Kowalczyk, 2022).

2) Lingkungan

Penting juga untuk mempertimbangkan ketahanan infrastruktur terhadap bencana alam dan perubahan iklim. Pembangunan infrastruktur yang tahan gempa, sistem drainase yang efisien, dan integrasi rencana mitigasi bencana menjadi elemen-elemen kunci dalam membangun infrastruktur yang dapat bertahan dalam situasi ekstrem (Johnson & Smith, 2022).

3) Sumber daya

Infrastruktur berkelanjutan mengambil peran penting dalam melindungi biodiversitas, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem alam. Penggunaan sumber daya alam yang bijaksana dan implementasi teknologi ramah lingkungan adalah langkah-langkah kunci dalam membangun infrastruktur yang tidak merusak lingkungan (Al-Manshoori & Weber, 2022).

Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif, untuk memahami secara mendalam dinamika strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan infrastruktur berkelanjutan di Desa Banyubiru. Jenis penelitian ini bersifat eksploratif dan deskriptif, bertujuan untuk menggali informasi tentang strategi pemberdayaan dan tantangan yang dihadapi. Prosedur penelitian melibatkan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi

dokumen. Penelitian ini akan mengikuti tahapan mulai dari persiapan, pengumpulan data, analisis data, hingga penulisan laporan hasil penelitian.

Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Banyubiru, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Desa ini dipilih karena memiliki potensi untuk pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan infrastruktur berkelanjutan. Waktu penelitian direncanakan selama 8 bulan, mulai dari bulan Oktober 2024 hingga Mei 2025. Selama periode ini, peneliti akan melakukan observasi lapangan, wawancara, dan pengumpulan data lainnya.

Subjek penelitian terdiri dari masyarakat Desa Banyubiru yang terlibat dalam pengelolaan infrastruktur desa dan anggota masyarakat yang terlibat langsung dalam infrastruktur desa. Sampel penelitian akan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* untuk memastikan informan yang relevan dan berpengetahuan. *Purposive sampling* adalah pengambilan sampel dengan menggunakan beberapa pertimbangan tertentu sesuai dengan kriteria yang diinginkan untuk dapat menentukan jumlah sampel yang akan diteliti (Sugiyono, 2019).

Sampel penelitian adalah kepala desa dan kepala dusun. Subjek dalam penelitian ini dipilih secara dengan mempertimbangkan posisi strategis mereka dalam pengambilan keputusan serta keterlibatan langsung dalam proses pembangunan infrastruktur di Desa Banyubiru. Peneliti mewawancarai Kepala Desa dan perwakilan Kepala Dusun karena mereka memiliki pengetahuan menyeluruh terkait kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan program pembangunan desa yang berkelanjutan. Pemilihan ini didasarkan bahwa mereka adalah aktor kunci yang dapat memberikan informasi mendalam dan representatif tentang strategi pemberdayaan masyarakat. Populasi penelitian mencakup pengambil kebijakan dalam pembangunan di Desa Banyubiru baik dalam aspek pengelolaan dan pengembangan infrastruktur desa.

Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan diskusi kelompok terfokus dengan masyarakat desa dan pengelola infrastruktur desa. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen terkait seperti laporan pengelolaan infrastruktur desa, dokumen perencanaan, dan studi-studi sebelumnya yang relevan. Sumber data ini akan memberikan gambaran komprehensif mengenai pemberdayaan masyarakat dan pengembangan infrastruktur berkelanjutan desa Banyubiru.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam dengan kunci informan, observasi langsung terhadap aktivitas pengelolaan infrastruktur desa dan studi dokumen untuk mengumpulkan informasi yang relevan (Creswell, 2014). Teknik ini dirancang untuk memperoleh data yang akurat dan mendalam mengenai strategi pemberdayaan dan tantangan yang dihadapi. Teknik keabsahan data mencakup triangulasi data, yaitu dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber seperti wawancara, observasi, dan dokumen untuk memastikan konsistensi dan keakuratan data (Denzin, 1978). Selain itu, member checking akan dilakukan dengan meminta umpan balik dari informan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dan interpretasi yang dilakukan sesuai dengan perspektif mereka. Keabsahan data juga diperkuat melalui audit trail dengan mencatat seluruh proses penelitian dan keputusan yang diambil. Dalam penelitian ini, keabsahan data dijaga dengan menerapkan teknik triangulasi. Miles & Huberman (1994). triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu di luar data itu sendiri untuk keperluan pengecekan

atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Triangulasi sumber yaitu membandingkan dan mengecek kebenaran data dari berbagai sumber yang berbeda, seperti informan dari perangkat desa, tokoh masyarakat, serta warga Desa Banyubiru. Hal ini dilakukan untuk mengetahui konsistensi informasi yang diperoleh terkait strategi pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

Triangulasi teknik yaitu membandingkan hasil data dari berbagai teknik pengumpulan data seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Tujuannya adalah untuk melihat apakah temuan dari satu teknik konsisten dengan teknik lainnya.

Dengan penerapan triangulasi ini, diharapkan data yang diperoleh memiliki validitas yang tinggi dan dapat dipercaya untuk menggambarkan secara akurat kondisi serta strategi yang diterapkan dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Banyubiru

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan teknik analisis tematik (*thematic analysis*) yang dikembangkan oleh Braun & Clarke (2006). Teknik ini dipilih karena mampu menggali makna dari data kualitatif secara mendalam dengan cara mengidentifikasi, menganalisis, dan menginterpretasikan pola-pola (tema) yang bermakna dalam data. Analisis tematik memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi narasi yang kompleks dan beragam dari partisipan serta menghubungkannya dengan teori pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.

Adapun tahapan analisis tematik dalam penelitian ini mencakup enam langkah utama, yaitu:

a. Familiarisasi terhadap data

Peneliti membaca dan menelaah seluruh data hasil wawancara, observasi, dan dokumen secara berulang-ulang untuk memahami konteks dan isi secara menyeluruh. Pada tahap ini dilakukan pencatatan awal mengenai ide-ide penting dan kesan awal yang muncul.

b. Pembuatan kode awal (*initial coding*)

Data yang telah difamiliarisasi kemudian dikodekan dengan cara menandai bagian-bagian teks yang relevan. Kode adalah label singkat yang menjelaskan isi atau makna dari bagian tertentu dalam data, dan digunakan untuk mengelompokkan informasi penting terkait strategi pemberdayaan maupun hambatan yang dihadapi.

c. Pencarian tema (*searching for themes*)

Setelah proses pengkodean selesai, kode-kode yang serupa atau saling berkaitan dikelompokkan menjadi tema awal. Tema merupakan pola yang muncul dari pengelompokan kode dan mencerminkan aspek penting dari data dalam kaitannya dengan pertanyaan penelitian.

d. Peninjauan ulang tema (*reviewing themes*)

Tema-tema awal kemudian ditinjau ulang untuk memastikan konsistensi, kejelasan, dan keterkaitannya dengan keseluruhan data. Pada tahap ini, tema yang terlalu luas dapat dipecah, sementara tema yang tumpang tindih dapat digabungkan atau disesuaikan.

e. Pemberian nama dan definisi tema (*defining and naming themes*)

Setiap tema yang telah ditetapkan kemudian diberi nama dan dijelaskan batasan serta esensinya. Tujuannya adalah agar setiap tema dapat diinterpretasikan secara jelas dan mendalam sesuai dengan konteks teori pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa.

f. Penyusunan laporan hasil analisis

Tahap terakhir adalah menuliskan temuan-temuan analisis dalam bentuk naratif yang mendalam. Peneliti menyajikan kutipan-kutipan yang representatif dari informan untuk mendukung interpretasi tema, serta mengaitkannya dengan kerangka teori dan studi sebelumnya.

Melalui tahapan analisis ini, penelitian diharapkan mampu mengungkap dinamika strategi pemberdayaan masyarakat dan tantangan yang dihadapi secara utuh, serta memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan infrastruktur berkelanjutan di desa.

Hasil dan Pembahasan

Hambatan dan Tantangan dalam Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan infrastruktur berkelanjutan merupakan proses yang idealnya melibatkan seluruh lapisan masyarakat secara aktif, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat sering kali dihadapkan pada tantangan yang kompleks. Hasil wawancara dengan dua narasumber kunci, yakni Kepala Desa dan Kepala Dusun, mengungkapkan beragam hambatan yang tidak hanya bersifat teknis dan administratif, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, ekonomi, dan kultural. Lima tema utama yang muncul dari analisis tematik menunjukkan bagaimana kondisi lokal, struktur sosial, serta dinamika kekuasaan di tingkat desa sangat mempengaruhi jalannya pemberdayaan masyarakat.

1. Skala Prioritas yang Tumpang Tindih

Salah satu persoalan utama dalam proses pemberdayaan masyarakat terletak pada tahap perencanaan pembangunan. Meskipun desa telah memiliki dokumen perencanaan seperti RPJMD dan RKPDES, realisasinya sering kali menghadapi tantangan berupa konflik kepentingan antar kelompok masyarakat. Kepala Desa menuturkan: *“Kadang-kadang pemilihan dia untuk skala prioritas yang sulit karena dia kadang-kadang hanya ‘asuk gede menang kerai’, jadi tidak melihat kepentingan.”* (Pak Kades)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa alih-alih melihat pembangunan sebagai agenda kolektif, masyarakat cenderung memperjuangkan program yang memberi keuntungan langsung kepada kelompoknya. Hal ini menciptakan ketegangan dalam forum-forum musyawarah seperti Musdus dan Musrenbang. Senada dengan hal tersebut, Kepala Dusun mengungkapkan: *“Usulan masyarakat terlalu banyak, Mas. Nah tapi sesuai regulasi kan juga harus mengedepankan prioritas mana yang harus dikerjakan.”* (Pak Slamet)

Kedua kutipan tersebut mengindikasikan bahwa proses partisipatif dalam pembangunan belum diimbangi dengan kemampuan masyarakat dalam memaknai pentingnya skala prioritas. Akibatnya, pemerintah desa harus berperan aktif sebagai penentu akhir, yang berpotensi menimbulkan ketidakpuasan.

2. Ketimpangan Keterlibatan antar Wilayah

Perbedaan karakteristik sosial antara wilayah dalam desa juga memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Wilayah dusun asli memiliki kohesi sosial yang tinggi, sementara wilayah perumahan dalam sebuah wilayah yang dihuni oleh pendatang cenderung memiliki ikatan sosial yang lemah. Kepala Dusun menjelaskan: *“Kalau di dusun asli di RT 1 mungkin*

lebih mudah. Kalau yang di perumahan di RT 2, 3, dan 4... tetap harus kita kawal terus, Mas, untuk kegiatan partisipasi.” (Pak Slamet)

Kepala Desa menegaskan hal yang serupa ketika menyebut bahwa partisipasi warga di wilayah bawah jauh lebih rendah dibandingkan wilayah atas: *“Kalau yang di wilayah atas oke (daerah gunung), tapi kalau yang di bawah ya agak susah... kerja bakti jadi rendah.”* (Pak Kades).

Hal ini menunjukkan bahwa kondisi geografis dan status sosial-ekonomi memengaruhi ikatan kolektif dalam masyarakat. Pemerintah desa menghadapi tantangan dalam menyatukan warga dengan latar belakang dan pola hidup yang berbeda untuk terlibat secara aktif dalam pembangunan.

3. Rendahnya Partisipasi karena Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi menjadi faktor dominan yang mempengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat. Kepala Dusun menyebutkan bahwa banyak warga yang bekerja di luar desa karena tuntutan pekerjaan memiliki waktu terbatas untuk mengikuti kegiatan pembangunan: *“Banyak pekerja pabrik dan sebagainya. Itu waktunya mereka tidak ada untuk melaksanakan kerjaan tersebut.”* (Pak Slamet)

Kepala Desa mengaitkan menurunnya semangat gotong royong dengan adanya bantuan sosial yang dianggap “menggugurkan” kewajiban warga: *“Dengan adanya BLT... kerja bakti jadi rendah. Karena mereka rumongso ora entuk opo-opo.”* (Pak Kades)

Kedua pernyataan ini memperlihatkan bagaimana realitas ekonomi masyarakat menyebabkan terjadinya pergeseran nilai. Masyarakat menempatkan kepentingan pribadi dan penghasilan sebagai prioritas utama, sehingga pembangunan desa dianggap sebagai urusan pemerintah saja, bukan tanggung jawab kolektif.

4. Minimnya Keterlibatan Generasi Muda

Regenerasi dalam pelibatan warga juga menjadi masalah serius dalam proses pemberdayaan. Tidak adanya proses pewarisan dan keterlibatan secara menyeluruh antar kelompok usia, masih ada gap antar usia Kepala Dusun menyampaikan bahwa: *“Pemuda itu egonya masih tinggi... hanya ikut kalau disuruh, belum bisa memberikan dukungan yang maksimal.”* (Pak Slamet)

Namun permasalahan ini bukan hanya disebabkan oleh kurangnya kesadaran generasi muda, melainkan juga karena dominasi tokoh-tokoh tua yang belum memberi ruang untuk regenerasi: *“Wong tuo untuk melepaskan kendali itu masih rung ikhlas ya... yang enom kan ganteni yo wegah, karena merasa tidak dianggap.”* (Pak Kades).

Fenomena ini mencerminkan adanya stagnasi sosial dalam struktur komunitas desa, di mana peran-peran strategis masih didominasi oleh kelompok senior. Keterlibatan pemuda masih bersifat simbolik dan belum difasilitasi secara sistematis sebagai bagian dari transisi kepemimpinan desa.

5. Kurangnya Inklusivitas Sosial

Kelompok rentan seperti perempuan, lansia, dan difabel masih belum dilibatkan secara optimal dalam proses pembangunan. Masih ada kesenjangan pada kelompok-kelompok tertentu dalam partisipasi pembangunan di Desa Banyubiru. Kepala Desa mengungkapkan adanya stereotip negatif terhadap kelompok ini: *“Kaum marginal dianggap tidak punya potensi... kayak benalu. Padahal banyak juga yang sebenarnya bisa produktif.”* (Pak Kades)

Sementara itu, keterlibatan perempuan menurut Kepala Dusun masih sangat terbatas: *“Paling mengganti orang yang suaminya tidak berangkat... meskipun hanya sedikit, tapi minimal peran sertanya tetap.”* (Pak Slamet)

Kedua pernyataan ini mengindikasikan bahwa pemberdayaan yang berlangsung masih bias gender dan kurang responsif terhadap keragaman kondisi warga. Meskipun ada indikasi bahwa beberapa kelompok rentan mulai dilibatkan, pelibatan tersebut masih bersifat pasif dan bersandar pada inisiatif individu, bukan karena adanya sistem yang menjamin keterlibatan secara adil dan setara.

6. Strategi Pemberdayaan Masyarakat yang Efektif

Pemberdayaan masyarakat yang efektif dalam konteks pengembangan infrastruktur berkelanjutan tidak hanya berbicara tentang pelibatan warga dalam pembangunan fisik, tetapi juga bagaimana desa membangun struktur sosial, kapasitas individu, serta iklim kolaboratif yang berkelanjutan. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yakni Kepala Desa dan Kepala Dusun, ditemukan lima strategi utama yang digunakan oleh pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat secara lebih menyeluruh dan berkelanjutan. Strategi ini mencerminkan upaya-upaya adaptif pemerintah desa terhadap tantangan sosial yang telah diidentifikasi sebelumnya.

7. Strategi Pelibatan Kelembagaan

Salah satu strategi utama yang diterapkan adalah pelibatan masyarakat secara formal dalam struktur kelembagaan desa, khususnya dalam Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pembangunan. Kepala Desa menjelaskan bahwa pelibatan ini dilakukan secara lintas generasi, sebagai bagian dari pendekatan yang bersifat semi-formal tetapi tegas: *“Kami agak semi militer. TPK itu ada tiga: yang tua, yang muda. Itu kita paksakan SK-nya, karena kalau tidak ya gak maju-maju.”* (Pak Kades)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pelibatan tidak diserahkan semata-mata pada kesadaran individual, tetapi diatur melalui regulasi formal ditingkat desa yang memaksa keterlibatan secara sistemik. Kepala Dusun menambahkan bahwa masyarakat juga dilibatkan sejak awal dalam forum-forum perencanaan: *“Dalam perencanaan pembangunan di desa itu tetap dari warga... diberikan kesempatan mengajukan usulan-usulan melalui rapat di tingkat RT, RW, kemudian di tingkat dusun.”* (Pak Slamet)

Strategi pelibatan ini penting untuk menciptakan rasa kepemilikan terhadap program desa, sekaligus membangun transparansi dalam pengambilan keputusan.

8. Strategi Penguatan Kapasitas Masyarakat

Pemberdayaan juga dilakukan melalui peningkatan kapasitas teknis dan keterampilan warga, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur berkelanjutan. Pemerintah desa menggandeng pihak luar seperti Dinas PUPR dan perusahaan swasta untuk memberikan pelatihan langsung kepada masyarakat. Kepala Dusun menyampaikan: *“Dulu pernah ada pelatihan tukang bersertifikat dari Surabaya, juga dari Semen Bima di tahun 2023 untuk kompetensinya.”* (Pak Slamet)

Kepala Desa menambahkan bahwa pelatihan juga diarahkan pada generasi muda dan teknologi baru, seperti penggunaan drone: *“Kami kirim yang muda-muda untuk pelatihan drone... yang tua jangankan pegang HP, pegang drone saja kesulitan.”* (Pak Kades)

Strategi ini mencerminkan pentingnya pembangunan kapasitas agar masyarakat tidak hanya dilibatkan secara fisik, tetapi juga secara fungsional dan profesional. Pelatihan ini juga membuka peluang kerja baru bagi warga desa dalam sektor pembangunan.

9. Strategi Sosial-Kultural

Selain pendekatan struktural dan teknis, strategi yang bersifat sosial dan kultural juga digunakan untuk meningkatkan partisipasi. Salah satunya adalah pendekatan melalui tokoh masyarakat. Kepala Desa menggambarkan pentingnya tokoh-tokoh informal sebagai jembatan antara kebijakan desa dan pemahaman warga: *“Kita dekati tokoh masyarakat... dia jadi bayangan Pak Kades. Kita jelaskan, dia yang menyampaikan ke masyarakat.”* (Pak Kades)

Di sisi lain, strategi apresiasi sesuai kultur dan pemberian ruang kepada warga juga terbukti efektif. Kepala Dusun menjelaskan bahwa saat usulan warga diterima dan direalisasikan, muncul rasa dihargai yang memotivasi partisipasi selanjutnya: *“Kalau diberikan masukan... terus usulannya diterima, mereka merasa diwongke (dianggap). Itu menjadi pancingan agar mereka lebih aktif.”* (Pak Slamet)

Strategi ini membuktikan bahwa pemberdayaan masyarakat juga bersifat emosional dan simbolik mereka ingin merasa didengar, dihargai, dan dianggap bagian penting dari proses pembangunan. Pendekatan kultural menjadi relevan sebagai strategi peningkatan partisipasi, karena masyarakat merasa diterima.

10. Penguatan Partisipasi melalui Budaya Lokal

Nilai-nilai kearifan lokal seperti gotong royong masih menjadi sarana efektif untuk mendorong keterlibatan. Walaupun tidak semua wilayah menunjukkan semangat kolektif yang sama, praktik ini masih bertahan, khususnya di wilayah-wilayah yang mempertahankan nilai tradisional. Kepala Dusun menyampaikan: *“Gotong royong masih ada ya Mas. Meskipun ada tenaga-tenaga ahli, masyarakat juga terlibat dalam kegiatan itu.”* (Pak Slamet)

Kepala Desa menambahkan, perlu upaya keterlibatan beresama dalam setiap pembangunan yang sebelumnya sudah berjalan dari generasi ke generasi: *“Sebelum pembangunan, ya dibersihkan dulu tempatnya bareng-bareng... di daerah Pancuran dan Demakan itu masih berjalan.”* (Pak Kades)

Strategi ini menunjukkan bahwa penguatan nilai lokal bisa menjadi alternatif dari pendekatan formal yang kadang tidak efektif. Dengan menghidupkan kembali tradisi kolektif, masyarakat terdorong berpartisipasi bukan karena instruksi, tetapi karena nilai yang diyakini.

11. Menerapkan Prinsip Berkelanjutan

Strategi lain yang diterapkan adalah edukasi dan penanaman pemahaman tentang prinsip keberlanjutan dalam pembangunan. Kepala Dusun menekankan bahwa pembangunan tidak boleh berhenti pada fisik semata, tetapi harus memperhatikan manfaat jangka panjang dan keberlanjutan lingkungan: *“Harapannya ke depan ya tetap melaksanakan pembangunan yang lebih menekankan prinsip berkelanjutan... bukan sekadar bangun, tapi memperhatikan lingkungan, ekonomi, dan manfaat.”* (Pak Slamet)

Kepala Desa menegaskan bahwa pembangunan harus memperhatikan dampak berkelanjutan dan ada sistem perawatan “*Harapan kami itu ada kesinambungan. Bukan hanya setelah dibangun lalu ditinggal, tapi harus ada yang merawat.*” (Pak Kades)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa strategi jangka panjang harus disertai dengan kesadaran kolektif dan tanggung jawab bersama dalam menjaga hasil pembangunan. Hal ini penting agar partisipasi tidak berhenti di pelaksanaan, tetapi berlanjut dalam pemeliharaan dan pengembangan

Pembahasan

Hasil penelitian mengenai strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan infrastruktur berkelanjutan di Desa Banyubiru menunjukkan adanya dinamika yang kompleks antara kondisi sosial masyarakat, kapasitas individu, dan pendekatan kebijakan desa. Hambatan-hambatan yang ditemukan di lapangan mencerminkan ketidakseimbangan antara idealitas konsep pemberdayaan dan realitas yang terjadi. Dalam konteks penyusunan skala prioritas pembangunan, masyarakat Desa Banyubiru belum sepenuhnya memahami pentingnya musyawarah untuk kepentingan bersama. Hal ini terlihat dari dominasi kepentingan kelompok dalam forum-forum perencanaan seperti Musrenbang dan Musdus. Fenomena ini sejalan dengan pernyataan Hardianti et al., (2017) yang menyebutkan bahwa rendahnya kesadaran partisipatif masyarakat disebabkan oleh pemahaman yang minim terhadap proses pembangunan dan pentingnya keterlibatan sejak tahap awal perencanaan.

Di sisi lain, ketimpangan keterlibatan antar wilayah di Desa Banyubiru turut menjadi faktor penghambat. Dusun-dusun asli menunjukkan tingkat partisipasi yang lebih tinggi karena memiliki kohesi sosial yang kuat, sementara wilayah hunian baru atau pendatang cenderung kurang aktif. Hal ini menunjukkan bahwa faktor sosiokultural dan ikatan komunitas memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan pemberdayaan. Mardikanto & Soebiato (2013) menyatakan bahwa pemberdayaan akan lebih efektif apabila dilandasi oleh kekuatan sosial yang bersumber dari kebersamaan dan identitas kolektif.

Aspek ekonomi juga menjadi kendala utama dalam rendahnya partisipasi. Banyak masyarakat desa yang bekerja di luar wilayah, memiliki waktu terbatas, dan cenderung menempatkan kegiatan pembangunan sebagai beban tambahan. Lebih jauh, bantuan sosial seperti BLT (Bantuan Langsung Tunai) tanpa mekanisme partisipatif justru menurunkan motivasi gotong royong, sebagaimana diamati dalam pernyataan kepala desa. Temuan ini mendukung pandangan (Kartasasmitra, 1996) yang menekankan bahwa pembangunan sejatinya harus berangkat dari kesadaran dan kebutuhan masyarakat sendiri, bukan hanya berdasarkan intervensi bantuan dari pemerintah.

Selain itu, keterlibatan generasi muda dalam pembangunan desa masih sangat minim. Meski secara jumlah kelompok usia produktif mendominasi komposisi penduduk, namun dalam praktiknya peran generasi muda lebih bersifat pasif. Kesenjangan generasi dan dominasi tokoh-tokoh tua dalam struktur kepemimpinan menjadi salah satu sebab. Fenomena ini menunjukkan adanya stagnasi dalam pembaruan sosial. Seperti yang dinyatakan oleh Dwiningrum (2011), partisipasi seharusnya tidak hanya berarti hadir secara fisik, tetapi juga mencakup keterlibatan emosional dan mental dalam pengambilan keputusan.

Kelompok-kelompok rentan seperti perempuan, lansia, dan difabel juga belum sepenuhnya dilibatkan dalam proses pembangunan. Keterlibatan mereka cenderung bersifat simbolik dan

tidak terintegrasi dalam struktur partisipatif yang sistematis. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, seharusnya inklusivitas menjadi komponen penting. Putri et al. (2021) menekankan bahwa aspek sosial dari pembangunan berkelanjutan di negara-negara berkembang sering kali terabaikan, terutama dalam hal keadilan partisipatif.

Namun demikian, strategi pemberdayaan yang diterapkan oleh pemerintah Desa Banyubiru menunjukkan pendekatan adaptif dan responsif terhadap tantangan-tantangan tersebut. Pelibatan kelembagaan melalui pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dengan struktur lintas generasi merupakan strategi yang menunjukkan integrasi pendekatan formal dengan upaya regenerasi sosial. Pendekatan ini selaras dengan pemikiran Rahabav et al. (2021), yang menyatakan bahwa pelibatan masyarakat akan lebih efektif jika didukung oleh struktur dan regulasi yang jelas di tingkat desa.

Penguatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan keterampilan teknis seperti pelatihan tukang bersertifikat dan pelatihan penggunaan drone merupakan bentuk pemberdayaan fungsional yang tidak hanya meningkatkan kompetensi warga tetapi juga membangun kesiapan sumber daya manusia desa dalam mendukung pembangunan. Ini memperkuat argumen Sumaryo (2006), bahwa strategi pemberdayaan yang efektif melibatkan proses pelatihan dan peningkatan kapasitas sebagai langkah penting dalam membentuk kemandirian masyarakat.

Pemerintah desa juga menggunakan pendekatan sosial-kultural, salah satunya dengan melibatkan tokoh masyarakat sebagai penghubung antara kebijakan desa dan warga. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemberdayaan tidak hanya dilakukan melalui mekanisme birokratis, tetapi juga dengan membangun kepercayaan melalui figur informal yang memiliki pengaruh sosial. Selain itu, strategi apresiasi seperti memberikan pengakuan terhadap usulan masyarakat yang direalisasikan menciptakan rasa dihargai dan diikutsertakan. Hal ini menunjukkan pentingnya aspek emosional dalam membangun partisipasi, sebagaimana dikemukakan oleh (Susilo, 2015), bahwa rasa memiliki terhadap program akan memperkuat keberlanjutan partisipasi.

Gotong royong sebagai nilai lokal juga tetap menjadi sarana yang efektif dalam membangun kebersamaan. Meskipun praktik ini tidak seragam di seluruh wilayah desa, upaya untuk mempertahankan dan menghidupkan kembali tradisi gotong royong menjadi bukti bahwa nilai-nilai lokal masih relevan dalam mendukung pembangunan partisipatif. Ini sejalan dengan pandangan Mardikanto & Soebiato (2013) mengenai pentingnya kearifan lokal dalam strategi pemberdayaan.

Akhirnya, pendekatan yang menekankan prinsip keberlanjutan dalam pembangunan menjadi strategi jangka panjang yang penting. Kesadaran bahwa pembangunan tidak berhenti pada pembangunan fisik tetapi harus menjamin keberlanjutan manfaat secara ekonomi, sosial, dan lingkungan menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki visi yang progresif. Pandangan ini diperkuat oleh Johnson & Smith (2022); Putri (2024) yang menyatakan bahwa keberlanjutan harus menjadi kerangka berpikir utama dalam pengembangan infrastruktur, bukan hanya fokus pada output, tetapi juga pada dampaknya terhadap masa depan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam konteks infrastruktur berkelanjutan di Desa Banyubiru dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural, sosial, dan kultural. Meski terdapat banyak tantangan, strategi-strategi yang diterapkan menunjukkan adanya arah yang sesuai dengan konsep pemberdayaan dan

pembangunan berkelanjutan sebagaimana dikemukakan dalam teori-teori pembangunan partisipatif

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan serta merumuskan strategi pemberdayaan masyarakat yang efektif dalam pengembangan infrastruktur berkelanjutan di Desa Banyubiru. Berdasarkan hasil analisis tematik dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat di desa ini masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Hambatan-hambatan yang muncul tidak hanya bersifat teknis dan administratif, tetapi juga menyangkut aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.

Permasalahan utama terletak pada belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam seluruh tahapan pembangunan, terutama dalam perencanaan. Skala prioritas sering kali disusun berdasarkan kepentingan kelompok tertentu, bukan berdasarkan kebutuhan kolektif. Ketimpangan keterlibatan antara wilayah dusun lama dan hunian baru juga memperkuat kesenjangan dalam solidaritas sosial. Selain itu, faktor ekonomi menjadi penghambat utama partisipasi aktif karena banyak warga lebih mengutamakan pekerjaan daripada kegiatan gotong royong desa. Minimnya keterlibatan pemuda serta kelompok rentan seperti perempuan, lansia, dan difabel menambah kompleksitas hambatan yang ada.

Meski demikian, Pemerintah Desa Banyubiru telah menginisiasi beberapa strategi pemberdayaan yang dinilai cukup efektif. Strategi pelibatan kelembagaan dengan membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) secara formal, penguatan kapasitas melalui pelatihan teknis dan teknologi, serta pendekatan sosial-kultural melalui tokoh masyarakat menjadi langkah konkret dalam membangun partisipasi. Selain itu, penguatan nilai lokal seperti gotong royong serta penanaman kesadaran akan prinsip pembangunan berkelanjutan menunjukkan adanya orientasi jangka panjang dalam pembangunan desa. Strategi-strategi ini mencerminkan pemahaman bahwa pemberdayaan masyarakat bukan hanya soal pelibatan fisik, tetapi juga mencakup pengakuan, pelatihan, dan penyadaran kolektif. Dengan demikian, keberhasilan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan infrastruktur berkelanjutan sangat ditentukan oleh kemampuan desa dalam mengelola dinamika sosial, memanfaatkan potensi lokal, serta membangun kesadaran bersama terhadap pentingnya partisipasi aktif dalam pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Manshoori, S., & Weber, A. (2022). Sustainable Urban Infrastructure: Integrating Digital Technologies in Middle Eastern Cities. *Journal of Urban Development*, 215–228.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 4th ed.
- Denzin, N. K. (1978). *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Method*. McGraw-Hill.

- Dwiningrum, S. I. A. (2011). *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Pustaka Pelajar.
- Hardianti, S., Muhammad, H., & Lutfi, M. (2017). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Desa (Program Alokasi Dana Desa di Desa Buntongi Kecamatan Ampapa Kota). *Jurnal Poli-Teknologi*, 5(1), 120–126. <http://elkanagoro.blogspot.com>
- Hendrawan, H. (2020). Penyediaan Tempat Istirahat Pada Jalan Umum Melalui Corporate Social Responsibiliy. *Jurnal Poli-Teknologi*, 19(1), 1–16. <https://doi.org/10.32722/pt.v19i1.2723>
- Johnson, A., & Smith, J. (2022). Sustainable Infrastructure Development: Challenges and Opportunities in the Digital Era. *Journal of Sustainable Development*, 45–58.
- Kartasmitra, G. (1996). *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Pustaka Cidesindo.
- Mardikanto, T., & Soebiato, H. P. (2013). *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*. Alfabeta.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis Second Edition. In *Sage Publications*.
- Putri, A. M. (2024). *Strategi Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan: Analisis Bantuan Luar Negeri Jepang dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. 1(2), 85–102.
- Putri, N. E., Helmi, H., Noer, M., & Yossyafra, Y. (2021). Systematic Literature Review (SLR) Dinamika Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan. *Jurnal Public Policy*, 7(2), 103. <https://doi.org/10.35308/jpp.v7i2.3811>
- Rahabav, B. P., Rorong, A. J., & Laloma, A. (2021). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa oleh Pemerintah Desa di Tengah Pandemi COVID-19. *Jap*, 7(111), 116–123.
- Rorong, F., Rares, J. J., & Ruru, J. M. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Tolombukan Satu Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Administrasi Publik UNSRAT*, 3, 46.
- Singh, R., & Kowalczyk, J. (2022). Digital Innovations in Eastern European Infrastructure Development: Challenges and Prospects. *European Journal of Infrastructure Research*, 89–104.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & RND*. Alfabeta.
- Sumaryo, G. (2006). Implementasi Participatory Rural Appraisal (PRA) dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 12(2), 82–90.
- Susilo, A. (2015). Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa. *Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 12(2), 110–125.
- Tumbel, S. M. (2014). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di DesaTumaluntung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Politico*, 6(1), 1–21.
- Tumbel, S. M. 2014. "Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Tumaluntung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan)." *Politico: Jurnal Ilmu Politik* 6(1).
- Wardhani, S. (2016). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Indonesia. *Jurnal Pengembangan Wilayah*, 8(1), 65–80.